

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGI DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BOYOLALI**



Disusun Oleh:

Amelia Dwiwanda

7111422036

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan UNNES PRIGEL yang berjudul:

“Evaluasi Implementasi Program Strategi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boyolali”

telah dilaksanakan dan dinilai oleh Dosen Pembimbing UNNES PRIGEL pada tanggal 27 Mei 2025 dan dinyatakan lulus.

Pendamping Lapangan PRIGEL,

Kepala Bidang PPM BAPPERIDA
Boyolali

Sri Mumpuni Setyaningsih, S.E.

NIP. 196809031996032001

Bayu Sahid Nugroho, S.P.

NIP. 197312212008011005

Semarang, 27 Mei 2025

Dosen Pembimbing UNNES

Kaprodi Ekonomi Pembangunan

Jeane Fransina Diana Talakua, S.IP., M.Si.

NIP. 199201222024212010

Dr. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si

NIP. 197705022008122001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya yang berjudul “Evaluasi Implementasi Program Strategi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boyolali”.

Laporan UNNES PRIGEL ini disusun berdasarkan hasil survei, observasi dan wawancara selama penulis melaksanakan magang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali. Hasil laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu karena selain hasil kerja penulis sendiri, juga berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara materi maupun spiritual kepada penulis, diantaranya dengan hormat :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun laporan magang.
2. Bapak Prof. Dr. Martono, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES).
3. Bapak Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNNES.
4. Ibu Dr. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNNES.
5. Ibu Jeane Fransina Diana Talakua, S.IP., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Magang Prigel yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik selama pelaksanaan magang prigel.
6. Bapak M. Syawalludin, AP, M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali.
7. Bapak Bayu Sahid Nugroho, S.P., selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPERIDA Kabupaten Boyolali yang telah memberikan arahan selama magang.
8. Ibu Sri Mumpuni Setyaningsih, S.E., selaku pendamping lapangan PRIGEL yang telah memberikan arahan dalam penyusunan laporan magang.

9. Keluarga besar BAPPERIDA Kabupaten Boyolali yang telah banyak membantu selama pelaksanaan magang.
10. Kedua orang tua penulis, saudara, teman penulis yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungan kepada penulis dalam proses pelaksanaan magang.
11. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses pelaksanaan magang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga penyusunan laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan penulis.

Karanganyar, 19 Mei 2025

Amelia Dwiwanda

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
RINGKASAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kemiskinan.....	6
2.2 Teori Lingkaran Kemiskinan.....	6
2.3 Indikator Kemiskinan.....	8
2.4 Faktor Penyebab Kemiskinan.....	9
2.5 Kerangka Berpikir.....	10
BAB III METODE UNNES PRIGEL	11
3.1 Lokasi Penelitian.....	11
3.2 Desain/Rancangan Penelitian.....	11
3.3 Penentuan objek Penelitian.....	16
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	17
3.5 Instrumen Penelitian.....	17
3.6 Teknik Analisis Data.....	18

BAB IV HASIL UNNES PRIGEL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Gambaran BAPPERIDA Boyolali	20
4.2 Aktivitas Magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali	24
4.3 Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.....	25
4.4 Peran Pemerintah Daerah melalui BAPPERIDA dalam Perencanaan dan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan	29
4.5 Evaluasi Implementasi Program Strategi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boyolali	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2024.....	2
Gambar 1. 2 Perbandingan Persentase Kemiskinan di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Tahun 2024	3
Gambar 2. 1 Teori Lingkaran Kemiskinan	7
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penelitian	10
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Boyolali.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pembagian Tugas Magang di BAPPERIDA Kabupaten Boyolali.....	12
Tabel 4. 1 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali.....	26
Tabel 4. 2 Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali dan Penyebarannya.....	28

RINGKASAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Boyolali. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan struktural seperti kesenjangan wilayah, akses pendidikan yang terbatas, dan rendahnya daya saing tenaga kerja tetap menjadi hambatan dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Laporan magang ini disusun berdasarkan pengalaman langsung penulis saat melaksanakan kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Selama kegiatan magang, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendukung proses perencanaan dan evaluasi program, mulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), koreksi data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga pemetaan anggaran kemiskinan dan stunting. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mengimplementasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Jaminan Kesehatan, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, serta Program Ketahanan Pangan.

Program-program tersebut dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun program berjalan, target pengurangan kemiskinan sesuai RPJMD belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, laporan ini merekomendasikan pengembangan sistem data kemiskinan yang lebih terintegrasi dan digital, peningkatan sinergi lintas sektor, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal seperti UMKM dan ekonomi desa. Dengan optimalisasi peran BAPPERIDA dan kolaborasi antarinstansi, diharapkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali dapat menjadi lebih efektif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

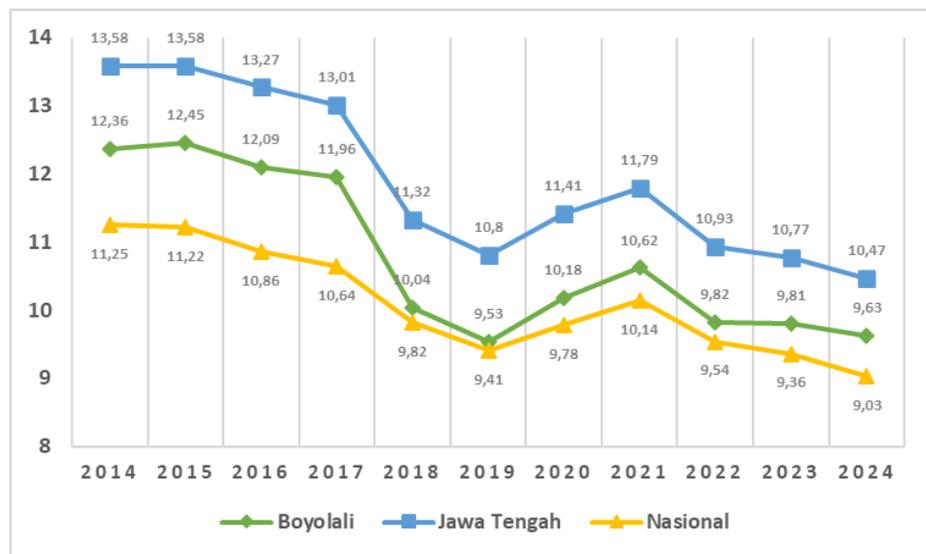
Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi strategis dalam pembangunan wilayah dan sumber daya manusia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali, jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 mencapai 1.099.850 jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ini berdampak pada peningkatan kebutuhan akan layanan publik, infrastruktur, serta program-program kesejahteraan sosial, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan.

Meskipun Kabupaten Boyolali memiliki potensi ekonomi yang besar, tantangan kemiskinan masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi fokus utama dan isu strategis dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Boyolali, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Berbagai kebijakan dan program telah dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi kemiskinan, kenyataannya angka kemiskinan di sejumlah daerah masih relatif tinggi. Kemiskinan tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Dampak dari kemiskinan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, akses terhadap infrastruktur dasar, hingga ketahanan pangan, yang pada akhirnya memengaruhi keberlanjutan pembangunan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Untuk memahami sejauh mana permasalahan ini terjadi secara faktual, diperlukan analisis berdasarkan data kuantitatif mengenai persentase penduduk miskin, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu

yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum, pada tahun 2014-2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan dari sisi persentasenya, terkecuali pada tahun 2020 dan 2021 persentase kemiskinan mengalami kenaikan.

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2024

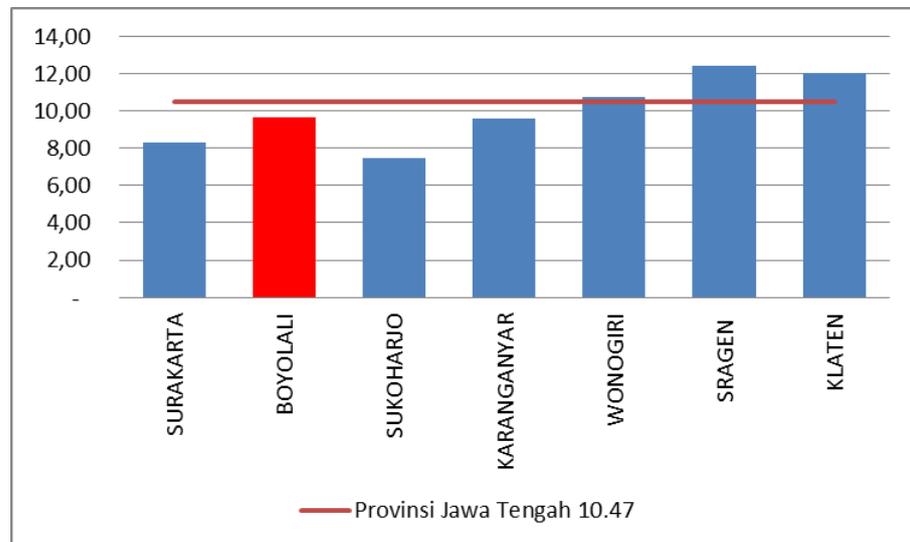


Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan gambar, persentase penduduk miskin Kabupaten Boyolali periode tahun 2014–2019 mengalami penurunan yang cukup konsisten, dengan pencapaian terbaik pada tahun 2019 saat angka kemiskinan mencapai 9,53%. Namun, pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di wilayah ini, seiring dengan dampak ekonomi yang meluas di seluruh Indonesia. Meski demikian, kondisi mulai membaik di tahun-tahun berikutnya, ditunjukkan dengan tren penurunan yang kembali terjadi hingga mencapai 9,63% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali mampu mengelola pemulihan ekonomi dengan cukup baik, bahkan berhasil mempertahankan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 10,47%.

Jika dilihat lebih lanjut dalam konteks regional, penting juga untuk membandingkan kinerja Boyolali dengan wilayah lain di sekitar yang tergabung dalam kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Boyolali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Sragen, Klaten, dan Wonogiri, tetapi masih lebih tinggi dibanding Karanganyar, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Perbedaan ini mengindikasikan ketimpangan efektivitas pelaksanaan program antarwilayah yang belum sepenuhnya teratasi.

Gambar 1. 2 Perbandingan Persentase Kemiskinan di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Tahun 2024



Sumber: BPS (diolah)

Meskipun data statistik menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali, dan berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah daerah, masih minim kajian evaluatif yang menelaah secara kualitatif efektivitas dan implementasi program penanggulangan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Boyolali. Kebanyakan kajian masih bersifat deskriptif kuantitatif dan berfokus pada angka, tanpa mengkaji faktor internal di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara strategis implementasi program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, dengan fokus pada peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program tersebut. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul “Evaluasi Implementasi Program Strategi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boyolali”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirincikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja program penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang dan diimplementasikan di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan program-program tersebut?
3. Bagaimana hasil evaluasi implementasi program strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan ke depannya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulisan laporan magang ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui program penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang dan diimplementasikan di Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan program-program tersebut.

3. Mengetahui hasil evaluasi strategis terhadap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan ke depannya.

1.4 Manfaat

Laporan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis selanjutnya pembaca dan mitra magang. Manfaat laporan magang ini sebagai berikut:

1. Penulis atau peneliti selanjutnya dapat menganalisis data dan mengevaluasi kebijakan publik, khususnya dalam isu penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penulis dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan analisis, dan pemahaman terhadap dinamika kebijakan daerah secara nyata.
2. Pembaca dapat mengetahui sumber informasi dan referensi yang relevan mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Boyolali serta strategi penanggulangannya. Pembaca juga dapat memperoleh wawasan mengenai efektivitas program pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan.
3. Mitra magang atau Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali dapat menjadikan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan kemiskinan ini sebagai pertimbangan dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ke depan serta mendukung peningkatan efektivitas program pembangunan daerah Kabupaten Boyolali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Menurut BPS (2016), kemiskinan adalah keadaan tidak mampu, secara finansial atau lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik dan nutrisi seseorang. Kemiskinan merupakan masalah inti dari sebuah perekonomian negara. Penelitian yang dilakukan oleh Yasnuri & Abubakar (2023) mengklaim bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia akan mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan terhadap PDB negara tersebut. Kemiskinan dipahami dari berbagai sudut pandang, yang paling utama adalah pandangan kekurangan materi yang mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Pandangan tentang kebutuhan sosial seperti dikucilkan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini biasanya dibedakan karena mencakup masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi oleh ekonomi. Pandangan kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Masyarakat miskin memiliki hak-hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya. Hak-hak yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki. Ukuran yang digunakan para analis dalam menetapkan jumlah penduduk miskin adalah cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Seseorang dikatakan miskin apabila dalam pemenuhan kebutuhan pokok makanan asupan kalorinya minimal 2100 kkal/hari per kapita, atau pemenuhan kebutuhan pokok non makanan seperti yang dikemukakan diatas.

2.2 Teori Lingkaran Kemiskinan

Permintaan (Demand), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk

berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya. Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran atau suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, yang mengatakan “a poor country is a poor because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2. 1 Teori Lingkaran Kemiskinan



Sumber: www.gstatic.com

Menurut Ragnar Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah

menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi permintaan (demand), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik, Smith menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi (Mulyadi s, 2003).

2.3 Indikator Kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut: Pertama, Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan). Kedua, Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi). Ketiga, Tidak adanya jaminan masa depan (karena

tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga). Keempat, Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual mau pun massa. Kelima, Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Keenam, Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Ketujuh, Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Kedelapan, Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Kesembilan, Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

2.4 Faktor Penyebab Kemiskinan

Berikut adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan:

- a. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi.
Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Sehingga, dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
- b. Masyarakat Pengangguran Meningkat.
Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Sehingga, angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Hal ini berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.
- c. Pendidikan yang Rendah.
Individu yang memiliki pendidikan yang rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah.
- d. Terjadi Bencana Alam.
Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya.

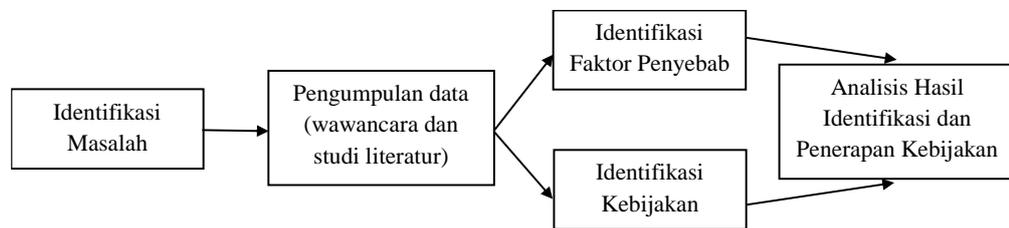
e. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata.

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan beberapa aspek yang telah ditentukan menjadi persoalan penting. Kerangka konseptual ini memberikan penjelasan sementara atas gejala-gejala yang menjadi fokus permasalahan.

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan gambar 2.5, langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi masalah, yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Untuk mendukung analisis, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait serta studi literatur dari dokumen resmi seperti laporan BAPPERIDA dan data BPS. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kemiskinan, seperti rendahnya akses pendidikan, ketimpangan ekonomi, dan minimnya lapangan pekerjaan. Di samping itu, dilakukan pula identifikasi terhadap kebijakan atau solusi yang telah diterapkan. Langkah terakhir adalah melakukan analisis terhadap hasil identifikasi serta penerapan kebijakan tersebut, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan bagaimana perbaikan yang dilakukan.

BAB III

METODE UNNES PRIGEL

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi UNNES PRIGEL dilaksanakan di:

Nama Mitra : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali
Alamat Mitra : Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jalan DR. Soepomo, Kemiri, Wonosari, Kemiri, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482
No. Telp : (0276) 321941
Fax : (0276) 325203
Email : bapperida@boyolali.go.id
Web : <https://bapperida.boyolali.go.id/>

3.2 Desain/Rancangan Penelitian

Penelitian dalam laporan magang ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan sebagaimana yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Menurut (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, penelitian mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan yang membutuhkan strategi kebijakan yang tepat guna memperbaiki kondisi yang tidak sesuai agar dapat kembali pada keadaan yang ideal.

Tabel 3. 1 Pembagian Tugas Magang di BAPPERIDA Kabupaten Boyolali

No	Tanggal	Subbagian	Tugas
1	3 s/d 7 Februari 2025	Subbagian Perencanaan Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Mencari bahan dan membuat susunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Boyolali terkait pencegahan stunting, gender, dan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Boyolali.
2	10 s/d 14 Februari 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	Membantu mengoreksi dan merevisi kekurangan data time series pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali 2026
3	17 s/d 21 Februari 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap data tangging Anggaran Responsive Gender (ARG) di SIPD -RI, berdasarkan tangging di KPPPA 2. Merekap jumlah sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA di Kabupaten Boyolali sesuai dengan status sekolahnya (swasta/negeri)
4	24 s/d 28 Februari 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Sosialisasi Rencana Sinkronisasi Program dari Yayasan Keluarga Sejahtera Boyolali (YKSB) dengan Perangkat Daerah di Kabupaten

			<p>Boyolali serta menjadi notulen dalam sosialisasi tersebut</p> <p>2. Membuat laporan terkait sosialisasi program yang dipaparkan oleh Yayasan Keluarga Sejahtera Boyolali (YKSB).</p>
5	3 s/d 7 Maret 2025	Subbagian Umum dan Kepegawaian	<p>1. Merekap data perjalanan dinas di Bapperida Kabupaten Boyolali Tahun 2024</p> <p>2. Menginput arsip surat bidang 3 Bapperida Kabupaten Boyolali Tahun 2024</p> <p>3. Merekap pelaporan indikator dan anggaran stunting di Kabupaten Boyolali Tahun 2024</p>
6	10 s/d 14 Maret 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<p>1. Membantu pengisian aplikasi bangda stunting di Kabupaten Boyolali Tahun 2024</p> <p>2. Membantu menyusun surat permohonan data analisis gender ke Perangkat Daerah</p>
7	17 s/d 21 Maret 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<p>1. Menyusun draft RAT kemiskinan dan pemetaan anggaran kemiskinan 2025</p> <p>2. Membantu memperbaiki SK lokus kemiskinan 2025 Kabupaten Boyolali</p>

			3. Membantu mencari data dukung SKP triwulan 3
8	24 s/d 27 Maret 2025	Subbagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap agenda surat keluar dan surat masuk Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia 2. Memberikan rekap anggaran kemiskinan 2024 ke Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 3. Merekap nomor rincian penerimaan dan pengeluaran per kode anggaran bulan Maret 2025
9	8 s/d 11 April 2025	Subbagian Keuangan	Membantu dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan bidang PPM Bapperida Kabupaten Boyolali
10	14 s/d 17 April 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti zoom rakor pengendali inflasi yang dirangkaikan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem dan sekolah rakyat 2. Mengikuti zoom sosialisasi petunjuk teknis bantuan pemerintah melalui SOPHI InPULS
11	21 s/d 25 April 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mencari bahan materi tentang kemiskinan untuk membuat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

			2. Melakukan konfirmasi data jumlah dan jenis UMKM di Kabupaten Boyolali
12	28 s/d 30 April 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu koordinasi dengan dinas KB terkait pengisian capaian indikator stunting berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 2. Merekap pelaporan indikator dan anggaran stunting di Kabupaten Boyolali Tahun 2024
13	5 s/d 9 Mei 2025	Subbagian Kerja Sama dan Inovasi	Mengikuti pelatihan menjahit produk kerajinan program penempatan tenaga kerja sub kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan bersama dinas koperasi dan tenaga kerja Kabupaten Boyolali
14	14 s/d 16 Mei 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti rapat "Kabupaten Kota Sehat" di Kabupaten Boyolali dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2. Menyusun laporan hasil rapat "Kabupaten Kota Sehat" di Kabupaten Boyolali dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
15	19 s/d 23 Mei 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	Menyusun perbaikan data untuk dokumen ranwal RKPD 2026 terkait Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)

16	26 s/d 28 Mei 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti koordinasi dengan DP2KBP3A terkait gender di Kabupaten Boyolali 2. Menyusun laporan terkait koordinasi dengan DP2KBP3A terkait gender di Kabupaten Boyolali
17	2 s/d 3 Juni 2025	Subbagian Perencanaan Substansi PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memisahkan dokumen Kepmendagri Kab/Kota 2024 (Per urusan) 2. Mengisi dokumen target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten/Kota dalam RAD SDCs Jawa Tengah 2024-2026

Sumber: Penulis, 2025

3.3 Penentuan objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali khususnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali, yaitu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pembangunan daerah. BAPPERIDA berperan dalam mengevaluasi kebijakan strategis, termasuk analisis perkembangan persentase penduduk miskin dan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus utama dalam laporan magang ini. Sebagai pusat perencanaan pembangunan, BAPPERIDA Kabupaten Boyolali merupakan tempat yang relevan bagi mahasiswa untuk mempelajari proses perumusan kebijakan publik dan implementasi program pembangunan berbasis data di tingkat daerah.

Pemilihan objek ini didasarkan pada peran strategis bidang tersebut dalam merancang, mengoordinasikan, serta mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan yang mencakup berbagai aspek pembangunan manusia, seperti pendidikan, kemiskinan, dan stunting. Bidang ini memiliki tugas dan wewenang utama dalam menyusun kebijakan teknis dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah di sektor pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, yang relevan dan selaras dengan fokus evaluasi implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Kemudian objek yang dianalisis yaitu kesesuaian antara program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan dengan hasil yang dicapai, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan sebagai dasar perbaikan kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.

3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, wawancara, dan studi literatur. Data diperoleh dari dokumen BAPPERIDA Kabupaten Boyolali, laporan program penanggulangan kemiskinan, serta data statistik BPS yang relevan dengan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Wawancara dilakukan dengan kepala bidang dan staf terkait yang menangani isu-isu terkait pembangunan manusia guna memperoleh informasi yang lebih aktual dan kontekstual terkait implementasi kebijakan dan program yang berjalan. Studi literatur juga digunakan untuk mendukung analisis berdasarkan teori kemiskinan dan evaluasi kebijakan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan literatur terhadap kondisi Kabupaten Boyolali guna menilai efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian magang ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

(BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali. Data utama yang menjadi fokus penelitian yaitu data persentase penduduk miskin di Kabupaten Boyolali dari tahun 2014 hingga 2024. Data ini merupakan instrumen utama dalam penelitian karena digunakan untuk mengevaluasi tren kemiskinan dan menilai efektivitas program penanggulangan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Instrumen data tersebut kemudian dibandingkan dengan presentase penduduk miskin wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN , provinsi, dan nasional. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data tersebut antara lain:

1. Komputer atau Laptop: digunakan untuk mengakses data dari situs resmi BPS dan BAPPERIDA serta untuk mengolah dan menyusun data ke dalam laporan magang.
2. Handphone: digunakan untuk keperluan dokumentasi selama kegiatan magang berlangsung, seperti saat observasi dan kegiatan wawancara.
3. Buku dan bolpoin: digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan konsultasi langsung dengan kepala bidang dan staf pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di BAPPERIDA Kabupaten Boyolali.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian magang ini teknis analisis data yang digunakan adalah berdasarkan proses analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sarosa, 2021) yaitu:

1. Pengumpulan data, merupakan tahap krusial dalam penelitian, karena data yang dikumpulkan menjadi dasar utama untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang valid. Tanpa data yang memadai dan akurat, analisis yang dilakukan tidak akan dapat menghasilkan hasil yang bermakna dan valid. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Bidang dan Staff bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia BAPPERIDA Kabupaten Boyolali dan studi literatur dari laman resmi pihak terkait.

2. Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
3. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan
4. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

BAB IV

HASIL UNNES PRIGEL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran BAPPERIDA Boyolali

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali merupakan perangkat daerah tipe A yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2024. Lembaga ini berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, khususnya di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi. Bapperida mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perumusan kebijakan teknis, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapperida bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum, ruang lingkup tugas dan fungsi Bapperida meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, riset, dan inovasi;
2. Penyusunan dan pemaduan dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta rencana kerja perangkat daerah;
3. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi dalam rangka mendukung perumusan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, Bapperida Boyolali mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antarunit

organisasi serta antarperangkat daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilandaskan pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal antarperangkat daerah.

Bapperida Kabupaten Boyolali mendukung pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana dicanangkan dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boyolali:

Visi:

“Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)

Misi:

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Dalam mendukung pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan terstruktur, Bapperida Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam sejumlah bidang yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Secara keseluruhan, terdapat empat bidang utama yang menangani kegiatan operasional Bapperida Kabupaten Boyolali, yaitu:

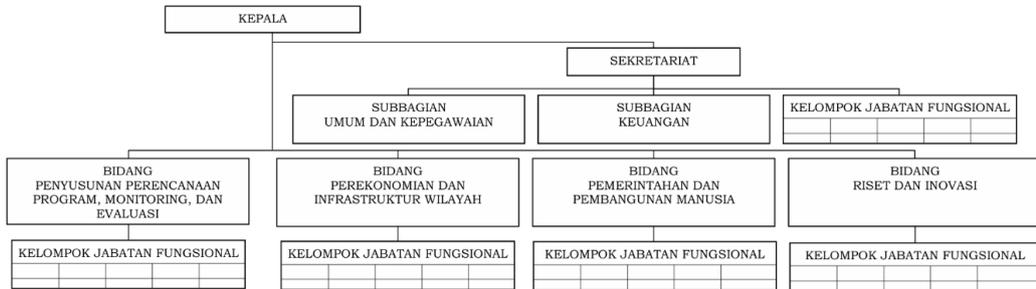
- a. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi
- b. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- d. Bidang Riset dan Inovasi

Dari keempat bidang tersebut dibagi lagi dalam beberapa sub bidang sesuai dengan bagian masing-masing bidang.

Struktur Organisasi

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2025.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Boyolali



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024

Struktur organisasi Bapperida Kabupaten Boyolali dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi secara optimal. Setiap unit dalam struktur organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur untuk memastikan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang terkoordinasi, efisien, dan akuntabel.

Kepala Bapperida Kabupaten Boyolali memiliki peran sentral dalam memimpin dan mengarahkan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi organisasi. Sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, Kepala Bapperida bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peran ini mencakup pengambilan keputusan strategis, pengawasan pelaksanaan program, serta penjaminan tercapainya target kinerja organisasi sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Sekretariat Bapperida merupakan unit yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kepala Bapperida. Sekretariat terdiri dari dua subbagian, yaitu:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang bertugas dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, tata usaha, hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik daerah.

- Subbagian Keuangan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan internal, penatausahaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pemrosesan gaji dan belanja operasional.

Struktur teknis utama Bapperida terdiri atas empat bidang, masing-masing dengan peran yang spesifik:

1. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi, yang menangani penyusunan rencana strategis pembangunan daerah serta pemantauan dan evaluasi kinerja program pembangunan.
2. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, yang berfokus pada sektor ekonomi, pertanian, perdagangan, industri, energi, dan infrastruktur publik lainnya.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang mengelola aspek perencanaan di sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan urusan kependudukan.
4. Bidang Riset dan Inovasi, yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi serta teknologi guna mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.

Kelompok Jabatan Fungsional di Bapperida Kabupaten Boyolali juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas secara profesional sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok ini terdiri dari berbagai jabatan fungsional yang berkontribusi langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan, analisis data pembangunan, hingga pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Seluruh tenaga fungsional tersebut bekerja berdasarkan standar kompetensi dan sistem kerja yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan struktur organisasi yang sistematis dan berbasis tugas, Bapperida Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang terencana, inovatif, dan berkelanjutan

4.2 Aktivitas Magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali

Selama melaksanakan kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali, saya terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran.

Beberapa kegiatan yang saya ikuti antara lain adalah penyusunan dan revisi dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD), pengumpulan dan koreksi data time series pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta rekapitulasi data Anggaran Responsif Gender (ARG), indikator stunting, dan data dukung pemetaan kemiskinan. Selain itu, saya juga turut mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi lintas instansi, serta membantu penginputan data ke dalam sistem informasi pemerintahan seperti SIPD dan aplikasi Bangda.

Saya juga mendapatkan pengalaman praktis dalam mengolah data kemiskinan, menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan membantu proses analisis fenomena ekonomi daerah melalui kegiatan pencarian dan verifikasi data lapangan. Keterlibatan langsung dalam proses administrasi, dokumentasi, hingga penyusunan laporan kegiatan memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika birokrasi dan tantangan teknis yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, saya memutuskan untuk mengambil topik laporan magang “Evaluasi Strategis Terhadap Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boyolali”. Topik ini dipilih karena sejalan dengan tugas dan aktivitas yang saya lakukan selama kegiatan magang, khususnya di Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia yang berfokus pada isu-isu pembangunan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Topik ini dianggap relevan karena mencakup dua aspek penting dalam perencanaan pembangunan, yaitu pelaksanaan program intervensi sosial dan evaluasi terhadap hasil serta dampaknya. Pengalaman magang yang melibatkan penyusunan dokumen perencanaan, pengolahan data mikro kemiskinan, hingga evaluasi program melalui pendekatan spasial dan evidence-based planning menjadi dasar yang kuat untuk mengangkat isu ini ke dalam laporan akademik.

Melalui laporan ini, saya ingin menguraikan bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh pemerintah daerah melalui BAPPERIDA Kabupaten Boyolali. Fokus diberikan pada efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan, tantangan dalam koordinasi lintas sektor, serta peran data dalam pengambilan kebijakan. Harapannya, laporan ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.3 Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang serta kajian terhadap dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2022–2026 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali dilaksanakan melalui berbagai program strategis yang mengacu pada kerangka nasional dan daerah, dengan pendekatan lintas sektor. Kerangka ini telah diinternalisasi dalam dokumen RPKD dan LP2KD Kabupaten Boyolali dan dijalankan oleh berbagai perangkat daerah di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kemiskinan dipahami bukan hanya sebagai rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar semua hal yang menjadi indikator pembangunan manusia. Kemiskinan yang terus-menerus tanpa intervensi tepat sasaran akan melanggengkan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), yaitu suatu kondisi di mana rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya menghasilkan produktivitas rendah dan pendapatan yang tetap stagnan atau menurun. Inilah yang menjadi dasar pentingnya intervensi melalui kebijakan publik dan program pemerintah yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia dan inklusi ekonomi.

Program-program yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali secara teoritis berupaya memutus siklus tersebut dengan membangun kapasitas produktif rumah tangga miskin melalui pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, serta akses terhadap layanan dasar. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (seperti bantuan sosial), tetapi juga meningkatkan kemampuan jangka panjang dalam menciptakan pendapatan secara mandiri.

Berikut adalah klasifikasi program-program yang telah dilaksanakan berdasarkan bidang prioritas dan peran intervensi:

Tabel 4. 1 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali

Bidang	Nama Program	Tujuan	Indikator Sasaran	Program Kegiatan
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan akses pendidikan siswa miskin	Jumlah siswa miskin menerima bantuan pendidikan	Bantuan biaya pendidikan SD-SMA serta pendidikan non-formal

Kesehatan	Program Jaminan Kesehatan	Menjamin layanan kesehatan gratis	Jumlah peserta miskin yang terdaftar	Pemberian kartu dan layanan kesehatan gratis
Ketenagakerjaan	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan keterampilan kerja masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi	Pelatihan keterampilan dan wirausaha
Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	Memberikan bantuan sosial bersyarat	Jumlah masyarakat miskin yang menerima PKH	Distribusi bantuan uang dan barang
Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang mengakses kualitas permukiman sehat	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Ketahanan Pangan	Program Ketahanan Pangan Desa	Menjamin ketersediaan pangan rumah tangga	Jumlah desa dan keluarga miskin mendapat intervensi pangan	Distribusi pangan dan penguatan cadangan pangan desa

Sumber: BAPPERIDA Boyolali (diolah)

Dengan pendekatan intervensi menyeluruh seperti ini, pemerintah daerah mencoba keluar dari jebakan “low level equilibrium trap” atau jebakan tingkat kesejahteraan rendah yang telah lama dijelaskan dalam teori ekonomi pembangunan klasik. Peran pemerintah melalui intervensi fiskal dan sosial diarahkan untuk mendorong kapasitas produktif masyarakat miskin agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi secara lebih adil dan berkelanjutan.

Tabel 4. 2 Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali dan Penyebarannya

Bidang	Nama Program	Anggaran (Rp)	Lokasi
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	2.600.000.000,00	Seluruh Kecamatan
Kesehatan	Program Jaminan Kesehatan	29.210.000.000,00	Seluruh Kecamatan
Ketenagakerjaan	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	215.000.000,00	Seluruh Kecamatan
Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	120.304.126.504,00	Seluruh Kecamatan
Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	14.400.000.000,00	Seluruh Kecamatan
Ketahanan Pangan	Program Ketahanan Pangan Desa	500.000.000,00	Kecamatan Gladagsari, Ampel, Andong, Juwangi, Kemusu, Klego, Cepogo

Sumber: BAPPERIDA Boyolali (diolah)

Meskipun program telah berjalan, tantangan yang perlu diatasi mencakup efektivitas targeting penerima manfaat, konsistensi monitoring, dan penguatan kapasitas kelembagaan pelaksana. Dengan demikian, evaluasi strategis tidak hanya penting untuk mengukur output program, tetapi juga untuk memastikan bahwa program benar-benar memberikan dampak dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural di Boyolali.

4.4 Peran Pemerintah Daerah melalui BAPPERIDA dalam Perencanaan dan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan daerah, termasuk program penanggulangan kemiskinan. Sebagai lembaga teknis perencana, BAPPERIDA bertanggung jawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat arah kebijakan tahunan pembangunan, indikator kinerja, serta alokasi anggaran pembangunan lintas sektor. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, BAPPERIDA berfungsi sebagai aktor kunci dalam merumuskan strategi, menetapkan prioritas program, serta mengoordinasikan pelaksanaan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tepat sasaran.

Melalui RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025, BAPPERIDA menegaskan komitmennya dalam mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirumuskan tiga pendekatan utama yang menjadi dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan. Ketiga pendekatan ini kemudian diintegrasikan dalam program prioritas pembangunan daerah seperti bantuan sosial, pelatihan kerja, perbaikan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Selain sebagai perencana, BAPPERIDA juga memainkan peran koordinatif melalui keanggotaannya dalam Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Boyolali. Dalam struktur ini, BAPPERIDA bertindak sebagai koordinator antar-OPD untuk memastikan integrasi program lintas sektor serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. BAPPERIDA juga memfasilitasi penggunaan data kemiskinan mikro yang diperoleh dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) untuk mengidentifikasi kelompok sasaran secara lebih akurat. Pendekatan berbasis data ini penting agar program-program intervensi dapat lebih efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam pelaksanaan program, BAPPERIDA tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga inovatif dan berbasis bukti (evidence-based planning). Misalnya, dengan memanfaatkan sistem informasi geografis untuk memetakan kantong kemiskinan dan merancang intervensi spasial yang sesuai. Seluruh pendekatan ini menunjukkan bahwa BAPPERIDA tidak hanya bertugas menyusun rencana, namun juga memastikan implementasi dan pengawasan berjalan secara efektif.

Dengan demikian, peran BAPPERIDA dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali sangatlah krusial. Lembaga ini bertindak sebagai tulang punggung dalam pengambilan kebijakan berbasis data, pengintegrasian program pembangunan yang inklusif, serta penguatan koordinasi antarsektor untuk mewujudkan pengurangan angka kemiskinan yang berkelanjutan. Melalui proses perencanaan yang partisipatif, teknokratis, dan adaptif terhadap isu-isu strategis daerah, BAPPERIDA menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Boyolali yang berdaya saing, mandiri, dan sejahtera.

4.5 Evaluasi Implementasi Program Strategi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boyolali

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali merupakan bagian penting dari upaya pembangunan kesejahteraan yang telah diupayakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai program telah berhasil dilaksanakan dengan

cakupan yang luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat miskin, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan tercermin dari keberadaan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, hingga RPKD yang secara eksplisit memuat target-target penurunan kemiskinan. Dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali, perlu adanya perbandingan kondisi kemiskinan sebelum dan sesudah program dijalankan.

Pada tahun 2021, kondisi kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengalami lonjakan akibat dampak pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari BPS, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,45%, naik dari 9,86% pada tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang cukup berat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun tersebut mencapai 1,74, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berada di angka 0,41, mencerminkan tingginya ketimpangan dan jarak antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pemulihan pascapandemi melalui intervensi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang lebih terarah mulai tahun 2022 dan berlanjut pada 2023 dan 2024.

Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mengimplementasikan sejumlah program strategis. Program-program tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, pelatihan kerja, perbaikan infrastruktur permukiman kumuh, serta distribusi pangan melalui Program Ketahanan Pangan Desa yang difokuskan di wilayah kantong kemiskinan. Pendekatan intervensi yang diterapkan terdiri atas tiga strategi utama, yaitu

pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, dan penanganan spasial kantong-kantong kemiskinan.

Setelah pelaksanaan program tahun 2022, 2023, dan 2024, indikator kemiskinan di Kabupaten Boyolali menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2022, pasca lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi, berbagai program mulai difokuskan untuk pemulihan sosial ekonomi, termasuk bantuan sosial, jaminan kesehatan, serta dukungan terhadap UMKM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil menurun dari 10,62% menjadi 9,81%. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 1,68 dan Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,39, mencerminkan awal pemulihan dari krisis. Pada tahun 2023, penurunan berlanjut menjadi 9,81%, dan kembali menurun menjadi 9,63% pada 2024. Di tahun 2024, P1 dan P2 masing-masing membaik menjadi 1,43 dan 0,31.

Dari segi capaian, data menunjukkan tren positif. Persentase kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya tercapai. Capaian angka kemiskinan belum mampu memenuhi target RPJMD sebelumnya yang berada pada kisaran 5,68% hingga 7,18%. Selain itu, indikator kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) juga masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat miskin masih hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Permasalahan utama yang diidentifikasi mencakup belum meratanya pelaksanaan program lintas sektor, lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi berbasis outcome, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Beberapa kendala utama yang teridentifikasi antara lain:

1. Kelemahan dalam targeting penerima manfaat

Data P3KE yang digunakan sebagai dasar perencanaan sering kali belum mutakhir atau tidak akurat di tingkat desa. Hal ini

menyebabkan banyak rumah tangga miskin yang tidak tercakup dalam intervensi, sementara sebagian penerima manfaat bukan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Kurangnya validasi data secara partisipatif di lapangan juga memperburuk efektivitas program.

2. Koordinasi antarsektor belum kuat

Meskipun telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), koordinasi antar-OPD masih bersifat formal dan belum terintegrasi dalam perencanaan anggaran. Beberapa program tumpang tindih antarinstansi atau berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Tidak adanya forum teknis rutin lintas sektor membuat harmonisasi program sulit dicapai.

3. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome lemah

Evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada output administratif (jumlah bantuan disalurkan, jumlah peserta pelatihan) dan belum pada dampak nyata (peningkatan pendapatan atau daya beli). Indikator kinerja belum fokus pada perubahan sosial dan ekonomi yang diharapkan.

4. Minimnya inovasi kebijakan lokal

Pemerintah daerah cenderung menjalankan program berbasis kebijakan nasional seperti PKH, KIP, atau BLT tanpa mengembangkan intervensi yang disesuaikan dengan konteks lokal Boyolali, seperti penguatan ekonomi berbasis potensi desa (misalnya susu atau hortikultura). Ketergantungan pada skema pusat membatasi inovasi dan efektivitas jangka panjang.

5. Rendahnya partisipasi masyarakat

Pelibatan warga miskin dalam penyusunan program masih minim. Sebagian besar intervensi bersifat top-down tanpa mendengarkan aspirasi langsung dari kelompok sasaran. Akibatnya, tingkat

kepemilikan dan keberlanjutan program rendah, karena masyarakat tidak merasa dilibatkan secara bermakna.

Berdasarkan kritik strategis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengurangan angka kemiskinan, efektivitas program belum mencapai sasaran maksimal. Perbaikan menyeluruh dalam sistem pendataan, koordinasi, evaluasi, inovasi, dan partisipasi publik diperlukan agar program benar-benar mampu memutus lingkaran kemiskinan struktural di Boyolali.

Untuk mendukung perbaikan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi penting dapat disampaikan untuk memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan ke depan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasional yang berbasis potensi lokal. Kedua, penting untuk mengembangkan sistem informasi dan data yang terintegrasi dan berbasis digital guna mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diperkuat dalam bentuk kolaborasi program dan harmonisasi indikator kinerja. Keempat, perluasan program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pengembangan UMKM, pertanian, dan pariwisata berbasis masyarakat juga perlu ditingkatkan. Kelima, mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome-based) perlu dikembangkan secara lebih sistematis dan partisipatif.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan memperkuat kelembagaan perencanaan, Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan serta menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan magang merupakan bagian dari kurikulum wajib yang harus diikuti oleh Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Kegiatan magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di lingkungan instansi pemerintah.

Selama pelaksanaan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali, praktikan mendapatkan pengalaman yang luas, baik dari segi pengembangan *hardskill*, *softskill*, pemahaman kebijakan publik, serta kemampuan analisis strategis terhadap isu pembangunan daerah. Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis data selama magang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pelatihan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan perbaikan infrastruktur dasar. Program tersebut menunjukkan tren positif dalam penurunan angka kemiskinan, meskipun target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan belum tercapai secara optimal.
2. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih dapat ditingkatkan, mengingat masih terdapat beberapa program yang berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi secara optimal.
3. Pendataan penerima manfaat program masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal akurasi dan pembaruan data, sehingga dapat memengaruhi ketepatan sasaran dari intervensi yang dilakukan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar program masih

mengacu pada kebijakan pusat tanpa banyak penyesuaian terhadap kondisi dan potensi lokal.

Oleh karena itu, meskipun capaian penurunan angka kemiskinan menunjukkan tren yang positif, efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan hingga evaluasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang dan evaluasi terhadap strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas program pemerintah daerah, antara lain:

1. Perlu dilakukan penyesuaian dan penguatan program yang berbasis pada potensi lokal agar dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat secara lebih berkelanjutan.
2. Mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor melalui forum komunikasi teknis dan perencanaan terpadu antar-OPD guna menghindari tumpang tindih kegiatan dan memperkuat efisiensi pelaksanaan program.
3. Disarankan untuk mengembangkan sistem pendataan kemiskinan yang lebih terintegrasi, akurat, dan diperbarui secara berkala, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa.
4. Penting untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, guna meningkatkan keterlibatan serta relevansi program terhadap kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Persentase Penduduk Miskin*.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1).
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1.
- LP2KD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Boyolali. (2024).
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Boyolali. (2024).
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022, January). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. In *Forum Ekonomi* (Vol. 24, No. 1, pp. 45-53).
- Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Boyolali 2025–2029 Pemerintah Kabupaten Boyolali. (2024).
- RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Boyolali. (2024).
- RPKD Kabupaten Boyolali 2022–2026 Pemerintah Kabupaten Boyolali. (2022).
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87-103.
- Triono, T. A., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Studi literatur laporan data kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59-67.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83-90.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Selama Magang

1. Apel pagi



2. Penerjunan magang



3. Menyambut kedatangan DPRD ke BAPPERIDA



4. Merekap data perjalanan dinas BAPPERIDA Boyolali



5. Sosialisasi Program dari YKSB bersama OPD



6. Membantu mencari data dukung SKP triwulan 3



**7. Mengikuti arahan
Perjenjangan Kinerja**



**8. Mengikuti sosialisasi zoom
teknis bantuan pemerintah**



**9. Mengisi anggaran BAZNAS
(Badan Amil Zakat Nasional)**



**10. Jumat sehat dengan bersih-
bersih**



**11. Mengikuti pelatihan
menjahit layanan disabilitas**



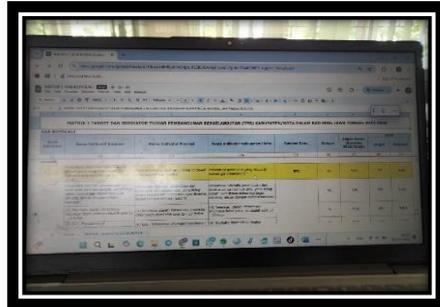
**12. Konfirmasi data jumlah dan
jenis UMKM**



**13. Halal Bihalal bersama
BAPPERIDA Boyolali**



**14. Mengisi target dan indikator
dalam RAD SDGs JATENG**



**15. Mengikuti CFD Boyolali
dengan Bupati Boyolali**



**16. Merekap nomor rincian
penerimaan dan pengeluaran**



**17. Membantu memperbaiki SK
lokus kemiskinan 2025**



**18. Membantu pelayanan publik
sebagai resepsionis**



Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS	Gedung L1 Dekanat FEB UNNES Kampus Sekaran, Gunungpati Kota Semarang - 50229 Telepon: (024) 86008700 Ext.700 Laman: https://fe.unnes.ac.id Email: fe@mail.unnes.ac.id
---	---	--

Nomor : B/18780/UN37.1.7/PK.01.06/2024
Hal : Permohonan Ijin Magang Prigel FEB UNNES 2025

2 Desember 2024

Yth. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali
Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jalan DR. Soepomo,
Kemiri, Wonosari, Kemiri, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482

Dengan hormat,
Dalam rangka memberikan bekal praktik di dunia kerja bagi mahasiswa, maka mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang diwajibkan melaksanakan magang Prigel. Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa di bawah ini:

No	Nama	NIM	Semester	Prodi
1	Galuh Setyani	7111422021	6	S1 Ekonomi Pembangunan
2	Mutiara Ramadani Utomo	7111422023	6	S1 Ekonomi Pembangunan
3	Amelia Dwiwanda	7111422036	6	S1 Ekonomi Pembangunan

Mohon diperkenankan melaksanakan magang di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin. Kegiatan magang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari s.d. 3 Juni 2025

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FEB,**

Agung Yulianto, S.Pd., M.Si.
NIP. 197407072003121002

Tembusan :
1. Koordinator Prodi S1 Ekonomi Pembangunan FEB;
2. Ketua Gugus MBKM FEB;
Universitas Negeri Semarang

Lampiran 3. Surat Konfirmasi Permohonan Izin



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Kompleks Perkantoran Terpadu Kab. Boyolali,
Jl. Dr. Soepomo, Siswodipuran, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0276) 321941, 325203 Fax (0276) 321941 Boyolali 57311,
Website : bp3d.boyolali.go.id, E-mail: bp3d@boyolali.go.id

Boyolali, 06 Desember 2024

Nomor : 070/2136/5.1/2024

Lamp. : -

Perihal : **Permohonan Ijin**
Magang Prigel FEB UNNES 2025

Kepada :

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan, FEB UNNES
di -

Tempat

Menanggapi Surat Saudara Nomor B/18780/UN37.1.7/PK.01.06/2024
Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Permohonan Ijin Magang Prigel FEB UNNES
2025, maka dengan ini kami memberikan ijin kegiatan Magang tersebut
sebagaimana telah direncanakan pada:

Waktu : 3 Februari s/d 3 Juni 2025

Lokasi : Bapperida Kabupaten Boyolali

Keterangan : Peserta Magang atas nama:

No	Nama	NIM	Semester	Progdi
1.	Galuh Setyani	7111422021	6	S1 Ekonomi Pembangunan
2.	Mutiara Ramadani Utomo	7111422023		
3.	Amelia Dwiwanda	7111422036		

Untuk selanjutnya apabila Praktik Kerja telah berakhir, mohon untuk dapat
memproses Laporan Akhir Praktik Kerja melalui Aplikasi *BI-SMART* (<https://bi-smart.boyolali.go.id>), sesuai dengan tata cara dalam Surat Edaran Sekretaris
Daerah Tahun 2024 tentang Pengajuan Ijin dan Penerbitan Surat Keterangan
Penelitian serta Pelaporan Hasil Penelitian melalui Aplikasi Boyolali *Innovation
System Management of Research and Technology (BI-SMART)* di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali yang dapat didownload melalui link:
<https://bit.ly/KKNmagangBISMART>.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

M. SYAWALLUDIN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741030 199603 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Peringgal.

Lampiran 4. Perjanjian Rancangan Pelaksanaan Magang

	RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG UNNES PRIGEL 2025 ANTARA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	
---	--	---

Nomor : B/1630/UN37.1.7/PK.02.01/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (30-01-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Instansi : Universitas Negeri Semarang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Negeri Semarang (UNNES) selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : M. Syawalludin, AP, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Magang UNNES Prigel Tahun 2025, dengan detail pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pihak KESATU mengirimkan 3 mahasiswa yaitu Galuh Setyani, Mutiara Ramadani Utomo, dan Amelia Dwiwanda sebagai Peserta Magang UNNES Prigel 2025 yang diselenggarakan oleh FEB UNNES;
2. Program Magang UNNES Prigel dilaksanakan dari tanggal 3 Februari 2025 sampai 3 Juni 2025;
3. Prodi yang terlibat adalah Ekonomi Pembangunan.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

<p>PIHAK KESATU,</p>  Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang	<p>PIHAK KEDUA,</p>  M. Syawalludin, AP, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali
--	--

Lampiran 5. Form Nilai Pembimbing Lapangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Gedung L1 Dekanat FEB UNNES
 Kampus Sekaran, Gunungpati
 Kota Semarang - 50229
 Telepon. (024) 86008700 Ext.700
 Laman: <https://fe.unnes.ac.id>
 Email: fe@mail.unnes.ac.id

Lembar Penilaian Pembimbing Mitra MBKM

Nama : Amelia Dwiwanda
 NIM : 7111422026
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Program MBKM : Magang Prigel

No	Komponen Penampilan Kerja	CD (56-60)	C (61-70)	BC (66-70)	B (71-80)	AB (81-85)	A (86-100)
1.	Personal						96
	a. Kehadiran						90
	b. Kedisiplinan						94
	c. Tanggung jawab						90
	d. Ketekunan						92
2.	Profesional (sesuai program studi)						92
	a. Persiapan kerja : Memahami tugas pekerjaan, menganalisa tugas, dll.*						89
	b. Pelaksanaan kerja : Menggunakan alat dengan benar, bekerja sistematis, inisiatif memecahkan masalah, terampil, dll.*						90
3.	c. Hasil kerja : Kualitas/kuantitas hasil pekerjaan, menjaga kebersihan alat/lingkungan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, dll.*						95
	Sosial						92
	a. Kerja sama/membantu dalam menyelesaikan tugas						
	b. Hubungan dengan atasan, pembimbing lapangan, karyawan.						
	c.						
	JUMLAH						

$$\text{Nilai} = \frac{920}{10} = 92$$


 Mengetahui
 Kepala Bidang PPM BAPPERIDA Boyolali
 Bayu Sanid Nugroho, S.P.
 NIP. 197312212008011005

Boyolali, 3 Juni 2025
 Pembimbing Lapangan Mitra


 Sri Mumpuni Setyaningsih, S.E.
 NIP. 196809031996032001

Lampiran 6. Form Pesan Kesan dan Kritik Saran Pembimbing Lapangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Gedung L1 Dekanat FEB UNNES
 Kampus Sekaran, Gunungpati
 Kota Semarang - 50229
 Telepon. (024) 86008700 Ext.700
 Laman: <https://fe.unnes.ac.id>
 Email: fe@mail.unnes.ac.id

No	Pesan dan Kesan	Kritik dan Saran
1.	Peserta magang disiplin terhadap aturan dan budaya BAPPERIDA, termasuk patuh pada perintah dan arahan	Saran : - Tingkatkan rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru disekitar dan pelajari / pahami sebagai pengetahuan diluar bangku pendidikan formal.
2.	Peserta magang dapat mengikuti substansi pekerjaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPERIDA dan dapat menyesuaikan dengan ilmu pendidikan yang sedang ditempuh.	

Lampiran 7. Jurnal Harian Mahasiswa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Gedung L1 Dekanat FEB UNNES
 Kampus Sekaran, Gunungpati
 Kota Semarang - 50229
 Telepon. (024) 86008700 Ext.700
 Laman: <https://fe.unnes.ac.id>
 Email: fe@mail.unnes.ac.id

Jurnal Harian MBKM 2025

Nama : Amelia Dwiwanda
 NIM : 7111422036
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Program MBKM : Magang Prigel
 Mitra Magang : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 Kabupaten Boyolali

No	Tanggal	Aktivitas Kegiatan	Paraf Pendamping Mitra
1	3 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Penerjunan Magang Prigel di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali dan pengenalan lingkungan kerja serta pembagian bidang masing-masing di BAPPERIDA Kabupaten Boyolali 	
2	4 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Mencari bahan terkait pencegahan stunting untuk membuat Rencana Aksi Daerah Kabupaten Boyolali 	
3	5 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Mencari bahan terkait Satu Data Indonesia (SDI) untuk membuat Rencana Aksi Daerah Kabupaten Boyolali 	
4	6 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Membantu dan ikut serta menyambut kedatangan DPRD ke BAPPERIDA Kabupaten Boyolali 	
5	7 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Mengoreksi kekurangan data time series pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali 2026 	
6	10 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Membantu membuat susunan terkait rencana aksi gender di Kabupaten Boyolali 	
7	11 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Membantu membuat susunan terkait rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Boyolali 	
8	12 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Merevisi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2026 	
9	13 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Merekap data tangging Anggaran Responsive Gender (ARG) di SIPD -RI, berdasarkan tangging di KPPPA 	
10	14 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi Mengikuti Sosialisasi Rencana Sinkronisasi Program dari Yayasan Keluarga Sejahtera Boyolali (YKSB) dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali serta menjadi notulen dalam sosialisasi tersebut 	
11	17 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti apel pagi 	



No	Tanggal	Aktivitas Kegiatan	Paraf Pendamping Mitra
		<ul style="list-style-type: none">Membuat laporan terkait sosialisasi program yang dipaparkan oleh Yayasan Keluarga Sejahtera Boyolali (YKSB)	
12	18 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMerekap jumlah sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA di Kabupaten Boyolali sesuai dengan status sekolahnya (swasta/negeri)	
13	19 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti Rapat Sosialisasi Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pajak Tahun 2025 di Bapperida Kabupaten Boyolali	
14	20 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMerekap data perjalanan dinas di Bapperida Kabupaten Boyolali Tahun 2024	
15	21 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiIkut serta membantu program bersih-bersih yang di lakukan di lingkungan sekitar Bapperida Kabupaten Boyolali	
16	24 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenginput arsip surat bidang 3 Bapperida Kabupaten Boyolali Tahun 2024	
17	25 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMerekap pelaporan indikator dan anggaran stunting di Kabupaten Boyolali Tahun 2024	
18	26 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenyiapkan bahan presentasi "Sharing Knowledge Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2025"	
19	27 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiIkut serta menghadiri rapat "Kabupaten Kota Sehat" di Kabupaten Boyolali dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	
20	28 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu menyusun laporan hasil rapat "Kabupaten Kota Sehat" di Kabupaten Boyolali dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	
21	3 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu pengisian aplikasi bangda stunting di Kabupaten Boyolali Tahun 2024	
22	4 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti rangkaian kegiatan studi tiru ketahanan pangan keluarga beresiko stunting ke Kabupaten Klaten	
23	5 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenyusun laporan studi tiru ketahanan pangan keluarga beresiko stunting	
24	6 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu menyiapkan permintaan data dari BPK terkait kemiskinan di Kabupaten Boyolali	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Gedung L1 Dekanat FEB UNNES
Kampus Sekaran, Gunungpati
Kota Semarang - 50229
Telepon. (024) 86008700 Ext.700
Laman: <https://fe.unnes.ac.id>
Email: fe@mail.unnes.ac.id

No	Tanggal	Aktivitas Kegiatan	Paraf Pendamping Mitra
25	7 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiIkut serta dalam kolaborasi pengisian kuesioner penilaian Satu Data Indonesia (SDI)	
26	10 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMelakukan pendataan indikator stunting Kabupaten Boyolali berdasarkan perpres nomor 72 tahun 2021	
27	11 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti pertemuan pemberian arahan dari Provinsi terkait Perencanaan Kinerja	
28	12 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu menyusun surat permohonan data analisis gender ke Perangkat Daerah	
29	13 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenyusun perbaikan data untuk dokumen ranwal RKPDP 2026 terkait Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	
30	14 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenyusun dan merekap data ARG tahun 2024 untuk dokumen LPPD	
31	17 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenyusun darf RAT kemiskinan dan pemetaan anggaran kemiskinan 2025	
32	18 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu memperbaiki SK lokus kemiskinan 2025 Kabupaten Boyolali	
33	19 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu mencari data dukung SKP triwulan 3	
34	20 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu mempersiapkan dokumen untuk kegiatan pengisian data balikan SIKS DJ	
35	21 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMerekap agenda surat keluar dan surat masuk Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	
36	24 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengirim surat undangan rapat dari Bapperida Kabupaten Boyolali ke Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali	
37	25 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan bidang PPM Bapperida Kabupaten Boyolali	
38	26 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenganalisis permasalahan dan isu strategis OPD pada Rancangan renja 2024	



No	Tanggal	Aktivitas Kegiatan	Paraf Pendamping Mitra
39	27 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMerekap nomor rincian penerimaan dan pengeluaran per kode anggaran bulan Maret 2025	
40	8 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti rangkaian kegiatan halal bihalal yang dilakukan oleh Bapperida Boyolali setelah libur lebaran di halaman depan kantor Bapperida	
41	9 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMemberikan rekap anggaran kemiskinan 2024 ke Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali	
42	10 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti zoom rakor pengendali inflasi yang dirangkaikan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem dan sekolah rakyat	
43	11 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti zoom sosialisasi petunjuk teknis bantuan pemerintah melalui SOPHI InPULS	
44	14 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu penyusunan perjanjian kinerja bidang PPM (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) di Bapperida Boyolali	
45	15 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu mengisi asersi data dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	
46	16 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu mengisi asersi data dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	
47	17 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu pemantauan pengisian kuesioner penilaian SDI (Satu Data Indonesia)	
48	21 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu menganalisa data dan informasi untuk mendukung fungsi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja bidang PPM (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
49	22 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagi	



No	Tanggal	Aktivitas Kegiatan	Paraf Pendamping Mitra
		<ul style="list-style-type: none">Mengumpulkan dan mencari bahan materi tentang kemiskinan untuk membuat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	
50	23 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti koordinasi dengan DP2KBP3A terkait gender di Kabupaten Boyolali	
51	24 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenyusun laporan terkait koordinasi dengan DP2KBP3A terkait gender di Kabupaten Boyolali	
52	25 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti koordinasi penyusunan data dokumen perencanaan bidang PPM (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
53	28 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti Massive Open Online Course Hospitality dalam pelayanan publik	
54	29 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu koordinasi dengan dinas KB terkait pengisian capaian indikator stunting berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021	
55	30 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti persiapan penyusunan Renstra Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029	
56	2 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiKonfirmasi data jumlah dan jenis UMKM di Kabupaten Boyolali	
57	5 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu tugas administrasi dan pelayanan publik sebagai resepsionis di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali	
58	6 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti pelatihan menjahit produk kerajinan program penempatan tenaga kerja sub kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan bersama dinas koperasi dan tenaga kerja Kabupaten Boyolali	
59	7 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagi	



No	Tanggal	Aktivitas Kegiatan	Paraf Pendamping Mitra
		<ul style="list-style-type: none">Mengisi Target dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Boyolali dalam RAD SDGs JAWA TENGAH 2024-2026	
60	8 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenginput data capaian program SDGs bidang kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Boyolali ke dalam sistem monitoring	
61	9 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti rapat koordinasi internal bidang PPM terkait evaluasi pelaksanaan program kerja triwulan II tahun 2025	
62	14 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu mengisi anggaran non-pemerintah dari BAZNAS untuk Kabupaten Boyolali	
63	15 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengisi program/kegiatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDGs JAWA TENGAH Non-Pemerintah	
64	16 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiIkut serta membantu program bersih-bersih yang dilakukan di lingkungan sekitar Bapperida Kabupaten Boyolali	
65	19 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti pembahasan Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran (EVRAN) Pemerintah Daerah Tahun 2024	
66	20 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti acara pembukaan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) bersama pemerintah daerah	
67	21 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti zoom Forum Satu Data Jawa Tengah (SDJT) Tahun 2025 Semester 1	
68	22 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengikuti rapat pembahasan RPJMD di BAPPERIDA Boyolali	
69	23 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMerekap Anggaran Untuk Pencapaian SDGs Provinsi Tahun 2024-2026	



No	Tanggal	Aktivitas Kegiatan	Paraf Pendamping Mitra
70	26 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMembantu Pelaksanaan Sosialisasi Permendagri nomor 13 Tahun 2025 tentang Pos Pelayanan Terpadu	
71	27 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMengarsipkan dokumen perencanaan dan laporan hasil koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	
72	28 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMenganalisis tren belanja program sektor sosial berdasarkan data APBD Kabupaten Boyolali tahun 2022-2024	
73	2 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiMerecap dan menyusun dokumentasi akhir kegiatan magang serta menyusun laporan akhir untuk diserahkan ke pembimbing lapangan	
74	3 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none">Mengikuti apel pagiPenarikan Magang Prigel di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali	

Boyolali, 3 Juni 2025
Mengetahui,
Pembimbing Lapangan Mitra

Sri Mumpuni Setyaningsih, S.E.
NIP. 196809031996032001

Lampiran 8. Surat Pengakuan Produk



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Kompleks Perkantoran Terpadu Kab. Boyolali,
Jl. Dr. Soepomo, Siswodipuran, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0276) 321941, 325203 Fax (0276) 321941 Boyolali 57311,
Website : bp3d.boyolali.go.id, E-mail: bp3d@boyolali.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 500.6.13 / 324 / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Sahid Nugroho, S.P.
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(BAPPERIDA) Kabupaten Boyolali

dengan ini menyatakan bahwa kami telah menggunakan produk hasil karya mahasiswa berupa:

Nama Produk : Peta Batas Kecamatan Kabupaten Boyolali
Penggunaan : Perencanaan Wilayah dan Penataan Administrasi Kecamatan
Dampak : Memberikan informasi visual mengenai batas wilayah kecamatan
untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan
keputusan yang berbasis data spasial di Kabupaten Boyolali.
Pencipta : Amelia Dwiwanda (7111422036)

Saya mengucapkan terima kasih dan akan menggunakan produk tersebut untuk. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 27 Mei 2015

**KEPALA BIDANG PPM BAPPERIDA
KABUPATEN BOYOLALI,**



BAYU SAHID NUGROHO, S.P.

NIP. 197312212008011005

Lampiran 9. Hasil Produk

